

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang bersifat desentralisasi telah merubah pendekatan orientasi pembangunan yang tadinya dari atas ke bawah (*top-down*) menjadi pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Perubahan ini membawa dampak nyata pada proses pembangunan di tingkat daerah, jika di masa lalu terjadi pengaburan terhadap pembangunan yang berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif lokal akibat adanya sentralisasi program yang secara langsung mengabaikan pengembangan pertanian, maka saat ini telah terjadi perubahan drastis dan sangat kontras dikarenakan pemerintah daerah dituntut untuk menggali dan merencanakan program sumber pendapatan di daerahnya. Akibatnya ketidaksiapan daerah menjadi faktor penghambat utama dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan.

Selain itu krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan terpuruknya struktur perekonomian yang parah dan berkepanjangan. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan atau kekeliruan yang mendasar dari pemerintah terdahulu yang coba diperbaiki oleh pemerintah sekarang melalui GBHN tahun 1999-2004. *Pertama*, membangun perekonomian yang berkeunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif. *Kedua*, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. *Ketiga*, mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Perubahan kebijaksanaan pembangunan dan kondisi perekonomian yang memburuk ini telah memaksa para pengambil keputusan untuk lebih kreatif dalam menggali potensi yang ada di daerahnya. Mengingat sektor pertanian masih melibatkan hampir seluruh wilayah atau daerah di Jawa Barat (termasuk daerah perkotaan), yang merupakan sektor pilihan hampir 75% penduduk, maka pembangunan sistem ekonomi kerakyatan di Jawa Barat hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan pertanian yang terarah, terencana dan berkesinambungan. Begitu pula tatanan kesisteman yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif mengarah pada sistem agribisnis sebagai pilihan yang tepat untuk diterapkan, karena dapat meraih nilai tambah dari *on-farm* dan *off-farm* secara optimal, sehingga akan meningkatkan pendapatan para pelaku utama agribisnis baik petani maupun mitra usahanya.

Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan pertanian ke sistem agribisnis, maka pada hakekatnya berbagai kendala yang pada awalnya menjadi kelemahan dari daerah dapat berubah menjadi peluang yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terjadi karena pengembangan sistem agribisnis di daerah mencakup empat prinsip yaitu prinsip kerakyatan, berdaya saing, berkelanjutan, dan terdesentralisasi (Saragih, 2000).

Kabupaten Garut sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang secara geografis berada di wilayah Jawa Barat bagian selatan, dan termasuk dalam kawasan agribisnis unggulan Priangan Timur, memiliki potensi daerah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomiannya.

Hal ini disebabkan karena letak wilayahnya yang berpegunungan dengan sifat tanah yang kurang memungkinkan untuk dilakukan usaha tani secara intensif,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor  
MB-IPB



sehingga menimbulkan kendala dalam pengembangannya. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan Kabupaten Garut sebagaimana wilayah Jawa Barat bagian selatan lainnya relatif tertinggal dibandingkan dengan kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat bagian utara dan tengah.

Keteringgalan Kabupaten Garut tercermin dari kecilnya kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku yang hanya 3,04% dari nilai PDRB Jawa Barat, sementara pertumbuhan ekonominya pada tahun 2000 hanya sebesar 3,89%. Artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (4,90%). Salah satu kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam mendongkrak perekonomiannya adalah melalui pengembangan agribisnis, terutama agribisnis peternakan (BPS Propinsi Jawa Barat, 2000).

Dipilihnya subsektor peternakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut sebagai salah satu subsektor yang perlu dikembangkan dalam rangka: (1) menjalankan program *diversifikasi* komoditas, (2) produk akhir subsektor peternakan, yaitu daging dan susu tidak mengenal batas wilayah, karena merupakan substitusi impor sehingga memiliki peluang pasar baik lokal maupun ekspor. Di tingkat Propinsi Jawa Barat peluang pasar untuk daging sebesar 19,27%, sedangkan untuk susu masih sebesar 31,22%, (3) produk yang dihasilkan subsektor ini merupakan komoditas strategis, karena tingkat permintaan yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan industri yang bahan bakunya berasal dari produk akhir subsektor peternakan, (4) harga produk akhir subsektor peternakan cenderung terus meningkat, dan tidak mengalami fluktuatif seperti subsektor tanaman pangan yang pada saat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor  
MB-IPB



menghasilkan produksi maksimal harganya cenderung jatuh, dan (5) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan PDRB Kabupaten Garut.

Kebijaksanaan pengembangan agribisnis peternakan didukung kenyataan dimana PDRB Kabupaten Garut selama periode 1996-2000 menunjukkan bahwa sektor pertanian termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan, memberikan kontribusi terbesar (40,56%) dalam pembentukan ekonomi wilayah Kabupaten Garut (BPS Kabupaten Garut, 2000). Mengingat adanya kendala lingkungan, maka untuk menunjang pengembangan peternakan di daerahnya, pemerintah daerah Kabupaten Garut membuat kebijaksanaan pemanfaatan ruang untuk kawasan peternakan yaitu: (1) pengembangan kawasan peternakan secara intensif, (2) pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan sehingga kelestarian sumber makanan bagi ternak ruminansia tetap terjaga (Bappeka Kabupaten Garut, 2001a).

Untuk mendukung kebijaksanaan pemanfaatan ruang tersebut, maka komoditas ternak yang akan dikembangkan adalah ternak ruminansia yang benar-benar memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif, sehingga selain dapat menghasilkan surplus ekonomi bagi Kabupaten Garut sekaligus optimalisasi potensi sumberdaya wilayah dapat direalisasikan secara efisien. Penekanan kepada ternak ruminansia dikarenakan faktor kesesuaian lingkungan baik secara fisik, maupun agroklimat serta didukung dengan adanya lahan pertanian di dataran tinggi yang cukup luas dengan ekosistem pertanian tanaman palawija dan sayuran, menjadikan wilayah Kabupaten Garut cocok bagi pengembangan ternak ruminansia karena limbah pertanian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan hijauan ternak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor  
MB-IPB



Menurut Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat (2001a), kontribusi produksi daging dan susu Propinsi Jawa Barat terhadap Nasional pada tahun 2000 sebesar 16,94% untuk produksi daging, dan 34,83% untuk produksi susu. Pada kenyataannya produksi susu yang dihasilkan Jawa Barat belum mampu memenuhi permintaan masyarakatnya, karena sebagian produksinya didistribusikan keseluruh propinsi melalui industri pengolahan susu (IPS). Padahal penduduk Jawa Barat yang pada tahun 2000 mencapai 35,5 juta jiwa lebih, memerlukan suplai susu sekitar 257.686 ton/th, sehingga tingkat konsumsi tersebut masih dipenuhi dari susu impor sebesar 28,42% (Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, 2001b). Perkembangan produksi daging dan susu di Jawa Barat tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi Daging dan Susu di Jawa Barat Tahun 2000

No.	Komoditi	Produksi (ton)	Kebutuhan Jabar. (ton)	Terpenuhi (%)	Peluang (%)
1. TPB	Produksi Daging	185.550	229.840	80,73	19,27
	• Sapi	7.512	64.173	11,71	88,29
	• Kerbau	1.831	4.358	42,00	58,00
	• Domba	14.516	14.429	100,60	*0,60
	• Kambing	3.187	3.082	103,41	3,41
	• Babi	795	1.617	49,16	50,84
	• Kuda	3	6	49,14	50,86
	• Ayam Buras	24.938	26.502	94,10	5,90
	• Ayam Ras	130.587	113.622	114,93	*)14,93
	• Itik	2.181	2.051	106,34	*)6,34
3.	Produksi Susu Perah	184.445	268.149	68,78	31,22

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, 2001a.

Keterangan: \*) surplus.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (1996-2000), terjadi penurunan konsumsi daging rata-rata 0,88% per tahun sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia, sedangkan untuk susu walaupun sempat terjadi





penurunan konsumsi pada tahun 1997-1998 ternyata mengalami peningkatan sebesar 10,67% pada tahun 2000. Untuk memenuhi konsumsi daging dan susu, maka pemerintah pada tahun 2000 mengimpor daging sebesar 4,76% dari kebutuhan nasional dan susu diimpor sebesar 68,40%. Perkembangan konsumsi daging dan susu di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Konsumsi Daging dan Susu di Indonesia Tahun 1996-2000

No.	Tahun	Daging (ton)		Jumlah	Susu (ton)		Jumlah
		Suplai	Impor		Suplai	Impor	
1.	1996	1.632.200	29.000	1.661.200	386.000	739.400	1.125.400
2.	1997	1.555.100	33.400	1.588.500	357.200	692.800	1.050.000
3.	1998	1.228.500	14.100	1.242.600	316.400	522.000	838.400
4.	1999	1.195.700	22.900	1.218.600	367.500	679.900	1.047.400
5.	2000	1.445.200	72.300	1.517.500	417.800	904.300	1.322.100

Sumber: Departemen Pertanian Dirjen Bina Produksi Peternakan, 2000.

Untuk konsumsi daging pada tahun 2000 Jawa Barat menempati peringkat kedua dari total konsumsi daging nasional yaitu sebesar 13,07%, sedangkan konsumsi susu sebesar 21,77%. Konsumsi daging Jawa Barat baru mencapai 4,30 kg/kapita/tahun atau baru 42,57% dari standar norma gizi 10,10 kg/kapita/tahun. Pada tahun yang sama konsumsi susu sudah mencapai 6,61 kg/kapita/tahun atau 108,36% dari standar norma gizi 6,10 kg/kapita/tahun merupakan konsumsi tertinggi di Indonesia (Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, 2001b).

Melihat tingginya kontribusi dan besarnya peluang pasar Jawa Barat untuk produksi daging dan susu di tingkat nasional, maka sangatlah tepat apabila Kabupaten Garut turut berperan dalam mengisi peluang yang ada. Kenyataannya hingga saat ini kontribusi Kabupaten Garut terhadap agribisnis peternakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Program Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
 Institut Pertanian Bogor

MB-IPB



di Jawa Barat masih terbelang rendah. Dapat dikatakan subsektor peternakan belum berhasil secara signifikan meningkatkan perekonomian Kabupaten Garut. Hal ini diduga karena belum ditemukannya strategi yang tepat dalam pengembangannya.

Rendahnya kontribusi subsektor peternakan di Kabupaten Garut ditunjukkan dengan produksi daging yang hanya sebesar 3,62%, sedangkan produksi susu mencapai 24,21%, yakni peringkat kedua setelah Kabupaten Bandung yang menguasai 48,46% produksi susu Jawa Barat (Lampiran 1 dan 2). Rendahnya tingkat produksi agribisnis peternakan Kabupaten Garut dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Barat selain dikarenakan rendahnya tingkat populasi ternak juga tidak terlepas dari rendahnya produktivitas yang dihasilkan baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai akibat terbatasnya penerapan teknologi, serta belum memadainya SDM peternak dalam pengelolaan usaha dan pencegahan terhadap penyakit.

Selain itu ancaman seperti adanya persaingan produk dari luar, keadaan politik dan keamanan yang belum membaik, terjadinya alih fungsi lahan yang mengakibatkan berkurangnya lahan sumber pakan, ketersediaan pakan konsentrat serta wabah penyakit yang menyebabkan turunnya populasi dan produksi ternak, telah menempatkan komoditas peternakan di Kabupaten Garut pada posisi yang sulit untuk dapat mengungguli produk dari para pesaingnya. Akan tetapi keadaan ini dapat diperbaiki mengingat adanya beberapa kelebihan yang dimiliki Kabupaten Garut dalam mengembangkan agribisnis peternakan seperti, komitmen pimpinan yang tinggi, adanya pelaksanaan pembinaan secara kontinyu, daya dukung lingkungan, ketersediaan pakan hijauan yang diperoleh baik dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Merek IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

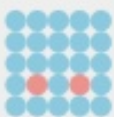


rumpun budidaya, rumput lapang maupun limbah pertanian, serta yang tidak kalah penting adalah adanya kebijakan pemerintah daerah.

Mengingat berbagai kendala maupun kelebihan baik internal maupun eksternal yang ditemui, maka dalam pengembangan agribisnis komoditas peternakan di Kabupaten Garut diperlukan suatu strategi yang tepat dan mampu mengantisipasi permasalahan yang ada serta sepenuhnya mendukung pengembangan komoditas ternak ruminansia unggulan di daerahnya. Untuk itu sebelum strategi pengembangan ditentukan terlebih dahulu perlu dianalisis komoditas ternak ruminansia yang bagaimana yang berpotensi untuk diunggulkan kemudian baru ditentukan strategi prioritas pengembangannya. Dengan implementasi yang tepat maka pengembangan komoditas ternak ruminansia unggulan di Kabupaten Garut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### B. Identifikasi Masalah

1. Potensi komoditas ternak ruminansia di Kabupaten Garut belum dikembangkan secara maksimal menjadi komoditas unggulan.
2. Belum teranalisisnya komoditas ternak ruminansia unggulan di Kabupaten Garut.
3. Belum diketahuinya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penentuan pilihan strategi pengembangan komoditas ternak ruminansia unggulan di Kabupaten Garut.
4. Belum diketahuinya prioritas strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut dalam mengembangkan komoditas ternak ruminansia unggulan di daerahnya.







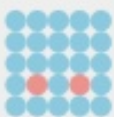
### C. Perumusan Masalah

1. Pilihan komoditas ternak ruminansia apa yang dimiliki Kabupaten Garut?
2. Apa komoditas ternak ruminansia unggulan di Kabupaten Garut ?
3. Faktor-faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi penentuan pilihan strategi pengembangan komoditas ternak ruminansia unggulan di Kabupaten Garut ?
4. Prioritas strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut dalam mengembangkan komoditas ternak ruminansia unggulan?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan pilihan komoditas dan menetapkan komoditas ternak ruminansia unggulan di Kabupaten Garut.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pengembangan komoditas ternak ruminansia unggulan di Kabupaten Garut.
3. Menganalisis dan menyusun pilihan strategi pengembangan yang dapat diterapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut dalam mengembangkan komoditas ternak ruminansia unggulan.
4. Menentukan prioritas strategi pengembangan komoditas ternak ruminansia unggulan di Kabupaten Garut.





## E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut.

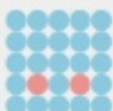
1. Penentu kebijakan, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Garut dalam menyusun perencanaan dan strategi pengembangan komoditas ternak ruminansia unggulan di daerahnya.
2. Penulis, sebagai sarana pengembangan wawasan dalam menganalisis suatu masalah terutama dalam hal strategi pengembangan komoditas ternak ruminansia unggulan.
3. Sebagai referensi bagi yang berminat melakukan penelitian dalam penyusunan perencanaan dan strategi pengembangan komoditas ternak ruminansia unggulan.

## F. Ruang Lingkup Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup penentuan komoditas ternak ruminansia unggulan dan strategi pengembangannya di Kabupaten Garut, yang meliputi penentuan pilihan komoditas, penetapan komoditas ternak ruminansia unggulan, pengidentifikasian faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh, penentuan pilihan strategi, serta penentuan prioritas strategi pengembangan komoditas ternak ruminansia unggulan. Untuk tahap implementasi selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Garut yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab mengembangkan dan mengelola agribisnis peternakan.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB  
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.